



**DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU  
DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH  
2020**



• Penghargaan Kepada DPMPD Padang Pariaman Sebagai Peringkat II Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2020



• Penghargaan Kepada DPMPD Padang Pariaman Sebagai Peringkat I Dengan Nilai 4,81 Dalam Penilaian Maturitas Level Antar OPD dan Unit Kerja Dilingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2020



## **K**ata Pengantar

Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna menunjang pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam dokumen ini, visi Kepala Daerah, yakni : **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”** dengan misi yang diemban oleh DLHPKPP yaitu Misi 4 dan Misi 6.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016-2021 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - TA 2020  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Pertanggungjawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2020 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2020.

Pariaman, Januari 2021



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	2
1. Kedudukan .....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
3. Struktur Organisasi .....	5
B. Permasalahan Utama .....	10
C. Sistematika Laporan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	14
1. Visi .....	14
2. Misi .....	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	16
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 .....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Hambatan dan Masalah yang di hadapi.....	45
B. Langkah Kedepan .....	46
<b>Lampiran</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan dan meningkatkan investasi di Padang Pariaman. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada investor dan masyarakat.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja maka disusun sebuah dokumen berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

## A. GAMBARAN UMUM DPMPTP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016–2021. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara transparan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)  
Kabupaten Padang Pariaman;

4. Terpeliharanya kepercayaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman terhadap penyelenggara Pemerintahan terutama dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

## **1. KEDUDUKAN**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) beralamat di Jalan Muhammad Syafei No.10 Pariaman No.Telp (0751) 4784539. Legalitas keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tertuang dalam Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas pokok dan fungsi**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

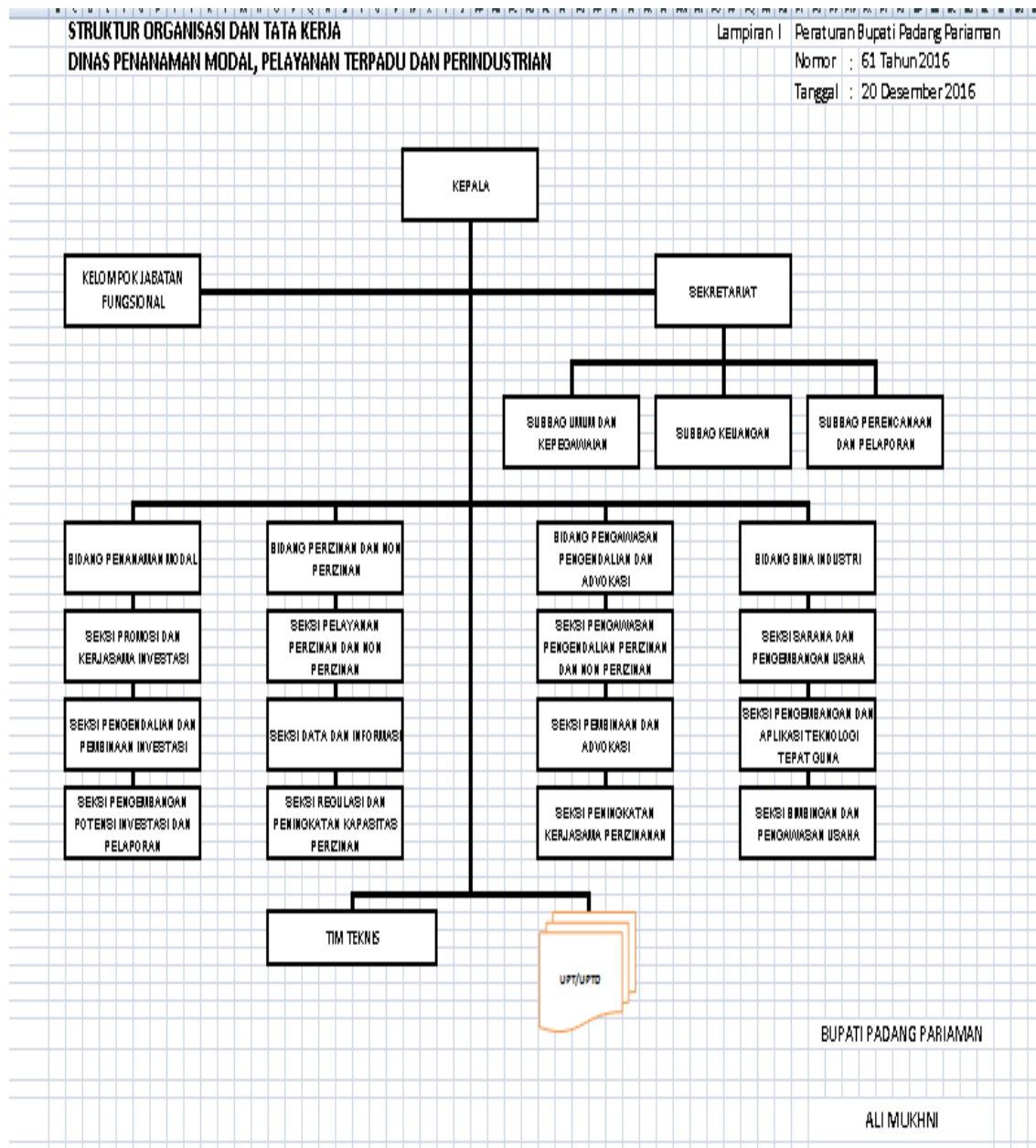
- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor. 61 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**



**a. Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan**

**Data Pegawai**

Kelangsungan Kinerja Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman setelah disyahnkannya

Peraturan Daerah Kabupeten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah dari personil Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pejabat Eselon II    | = 1 orang         |
| 2. Pejabat Eselon III.a | = 1 orang         |
| 3. Pejabat Eselon III.b | = 4 orang         |
| 4. Pejabat Eselon IV.a  | = 15 orang        |
| 5. Staf                 | = 11 orang        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>= 30 Orang</b> |

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	Pangkat dan Golongan
1	Rudy Repenaldi Rilis, SSTP, MM	19790402 199803 1 003	Kepala DPMPTP	Pembina Utama Muda(IV/c)
2	Sepno Fahmi, SE	19661110 1991121001	Sekretaris	Penata Tk I (III/d)
3	Jon Eka Putra, S.Sos,M.Si	196801131989021001	Kabid Penanaman Modal	Pembina (IV/a)
4	Emri Nurman, SSTP, MM	19790601 199810 1 001	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	Pembina (IV/a)
5	Trisna Junaili, ST	19770617 200501 2 006	Kabid Perindustrian	Pembina (IV/a)
6	Yen Hendry, SE.MM	19680601 200312 1 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)
7	Ns. Arismiati, S. Kep	19760306 200604 2 008	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Penata (III/c)
8	Ibrahim	196701011989051012	Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi	Penata Tk. I (III/d)
9	Nismawati Manza, SE.MM	197212311993032012	Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi	Penata Tk. I (III/d)
10	Des Andriani, S.Sos	197605022011012008	Seksi Peng. Potensi Investasi dan Pelaporan	Penata (III/c)
11	Suhatman, ST	197606052006041011	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penata (III/c)
12	Suryadi, SE, MM	197205311992021002	Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan	Pembina (IV/a)
13	Boni Handri, SH	196607111994031006	Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan Non Perizinan	Pembina (IV/a)
14	Nurtini, SE	196412311986022040	Seksi Pembinaan dan Advokasi	Penata Tk. I (III/d)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – TA 2020  
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

15	Wahirman, S.Sos	19741218 1994031003	Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan	Penata Tk. I (III/d)
16	Ismael. SE	196401281989031004	Seksi Data dan Informasi	Penata Muda Tk. I (III/b)
17	Lusy Mindawati, S.SIT	19620202 199203 1 004	Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha	Penata ( III/c )
18	Zizi Riski Aktawira, ST	19821125 200902 1 003	Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha	Penata Tk. I (III/d)
19	Nurlinda, S.Sos	19700618 199403 1 003	Seksi Pengem. Dan Apl Teknologi Tepat Guna	Penata Tk. I (III/d)
20	Arbetita	196706111991022002	Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Penata Muda Tk. I (III/b)
21	Ilmen	197201041994031002	Staf Seksi Wasdal Perizinan	Penata Muda Tk. I (III/b)
22	Evi Neldi	197304052006041010	Staf Kasubag Umum & Kepeg	Pengatur ( II/c)
23	Dewi Gustina, SE	197808022004062006	Staf Kasubag Keuangan	Penata Muda ( III/a)
24	Firman S.Sos	198401282010011003	Staf Kasubag Umum & Kepeg	Penata Muda (III.a)
25	Eliawati	197902042015052001	Staf Kasubag Keuangan	Pengatur Muda Tk I( II/b)
26	Lusi Elvira, ST	19860513 201101 2 016	Staf Bidang Perizinan	Penata Muda( III/a)
27	Hirachman, SE	19840319 201903 1 003	Staf Bidang Penanaman Modal	Penata Muda (III.a)
28	M. Reza Makarim	19710418 201903 1 007	Staf Bidang Sekretariat	Penata Muda (III.a)
29	Yossi Dayanti. D, ST	19851027 201903 2 003	Staf Bina Industri	Penata Muda (III.a)
30	Nelda Arliza, SE, AK, ME	19740921 200312 2 003	Staf Bidang Industri	Pembina (IV/a)

Sumber :Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020

**b. Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon**

Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

NO	NAMA	ESELON	JABATAN
1	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM	II	Kepala Dinas
2	SEPNOFAHMI, SE	III	Sekretaris
3	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	III	Kabid Penanaman Modal
4	EMRI NURMAN, S.STP, MM	III	Kabid Perizinan & Non Perizinan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – TA 2020  
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

5	TRISNA JUNAILI, ST	III	Kabid Bina Industri
6	YEN HENDRI, SE, MM	IV	Kasubag. Umum dan Kepegawaian.
7	Ns. ARISMIATI, S.Kep	IV	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan.
8	NISMAWATI MANZA, SE	IV	Kasi Promosi dan Kerjasama Investasi
9	DES ANDRIANI, S.Sos	IV	Kasi Pengemb.Potensi Investasi dan Pelaporan
10	IBRAHIM	IV	Kasi Pengendalian dan Pembinaan Investasi
11	SUHATMAN, ST	IV	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
12	ISMAEL, SE	IV	Kasi Data dan Informasi
13	SURYADI, SE, MM	IV	Kasi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan
14	BONI HANDRI, SH	IV	Kabid dan Kasi Wasdal Perizinan dan Non Perizinan
15	NURTINI, SE	IV	Kasi Pembinaan dan Advokasi
16	WAHIRMAN, S.Sos	IV	Kasi Peningkatan Kerjasama Perizinan
17	ZIZI RISKI AKTAWIRA, ST	IV	Kasi Sarana dan Pengembangan Usaha
18	NURLINDA, S.Sos	IV	Kasi Pengembangan dan Aplikasi TTG
19	LUSY MINDAWATI, S.ST	IV	Kasi Bimbingan dan Pengawasan Usaha
20	M. Reza Makarim	IV	Plt Kasubag Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas kategori jabatan eselon II satu orang dengan jabatan Kepala Dinas, eselon III 4 orang yaitu Sekretaris, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan, Bidang Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Nonperizinan serta Bidang Perindustrian. Sedangkan eselon IV 15 orang terdiri dari Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Kasubag. Perencanaan & Pelaporan, dan Kasubag keuangan, Kasi Promosi dan Kerjasama Investasi, Kasi Pengemb.Potensi Investasi dan Pelaporan, Kasi Pengendalian dan Pembinaan Investasi, Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Data dan Informasi, Kasi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan, Kasi Wasdal Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Pembinaan dan Advokasi, Kasi Peningkatan Kerjasama Perizinan, Kasi Sarana dan Pengembangan Usaha, Kasi Pengembangan dan Aplikasi TT, Kasi

Bimbingan dan Pengawasan Usaha. jadi Jumlah Eselon pada Dinas Penanaman Modal Padang Pariaman Tahun 2020 terdiri dari 20 Orang.

### c. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>
1	Rudy Repenaldi Rilis, SSTP, MM	19790402 199803 1 003	Kepala DPMPTP	S2 Manajemen
2	Sepno Fahmi, SE	19661110 1991121001	Sekretaris	S1, Ekonomi
3	Jon Eka Putra, S.Sos,M.Si	196801131989021001	Kabid Penanaman Modal	S2. Sain
4	Emri Nurman, SSTP, MM	197706202006041024	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	S2 Manajemen
5	Yen Hendry, SE.MM	19680601 200312 1 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S2 Manajemen
6	Ns. Arismiati, S. Kep	19760306 200604 2 008	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	S1 + Ns
7	Ibrahim	196701011989051012	Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi	SMA
8	Nismawati Manza, SE.MM	197212311993032012	Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi	S2, Management
9	Des Andriani, S.Sos	197605022011012008	Seksi Peng. Potensi Investasi dan Pelaporan	S1, ADM Negara
10	Suhatman, ST	197606052006041011	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	S1, Teknis
11	Suryadi, SE, MM	197205311992021002	Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan	S2, Management
12	Boni Handri, SH	196607111994031006	Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan Non Perizinan	S1, Hukum TT Ngra
13	Nurtini, SE	196412311986022040	Seksi Pembinaan dan Advokasi	S1, Management
14	Wahirman, S.Sos	197412181994031003	Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan	S1 Sosial
15	Ismael. SE	196401281989031004	Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan	S1, Ekonomi
16	Arbetita	196706111991022002	Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan	SMK
17	Ilmen	197201041994031002	Staf Seksi Wasdal Perizinan	SMA
18	Evi Neldi	197304052006041010	Staf Kasubag Umum & Kepeg	SMA
19	Dewi Gustina, SE	197808022004062006	Staf Kasubag Keuangan	S 1 Ekonomi
20	Firman	198401282010011003	Staf Kasubag Umum & Kepeg	S1, Adm Negara

21	Eliawati	197902042015052001	Staf Kasubag Keuangan	SMU Sos
22	Zizi Riski Aktawira, ST	198211252009021003	Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha	S1 Teknis
23	Lusi Elvira,ST	19860513 201101 2 016	Staf Perizinan dan Non Perizinan	S1 Teknis
24	Hirachman, SE	19840319 201903 1 003	Staf Bidang Penanaman Modal	S1, Ekonomi
25	M. Reza Makarim, SE	19710418 201903 1 007	Staf Kasubag Keuangan	S1, Ekonomi
26	Nurlinda, S.Sos	197006181994032004	Seksi Pengem.dan Apli Teknologi Tepat Guna	S1 Sosial
27	Trisna Junaili, ST	197706172005012006	Kabid Bina Industri	S1 Teknis
28	Nelda Arliza, SE, AK, ME	197409212003122003	Staf Bina Industri	S2 Ekonomi
29	Yossi Damayanti. D, ST	198510272019032003	Staf Bina Industri	S1 Teknis
30	Lusy Mindawati,S.ST	197704072002122003	Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha	D4 Kebidanan

Sumber :*Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian ( DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas Kategori pendidikan S2 7 orang, S1 17 orang,D IV 1 orang, SMA sederajat 5 orang dari 30 Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2020.

#### **4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Belum disusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai Master Plan penyelenggaraan penanaman modal di Padang Pariaman
2. Perlunya disusun peraturan mengenai partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Padang Pariaman
3. Belum meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM)
4. Belum selesainya perencanaan pembangunan sentra coklat Padang Pariaman

5. Belum selesainya perencanaan pembangunan kawasan industry kab.Padang Pariaman
6. Masih rendahnya tingkat penjualan produk hasil dari IKM

## **5. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2020, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2020.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja DPMPTP**

Menyajikan capaian kinerja DPMPTP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DPMPTP sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DPMPTP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DPMPTP Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPMPTP Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Aksi
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

---

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020.

Untuk mencapai kinerja Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) tahun 2020, Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja Tahun 2020, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2020. Target-target kinerja Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

---

## A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) maka struktur organisasi seluruh Perangkat Daerah berubah dan seiring dengan ini Renstra OPD pun direvisi sesuai urusan yang diembannya begitu juga dengan Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP). Sesuai revisi Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut;

- **Visi Kabupaten Padang Pariaman**

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi/lembaga harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan di masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi OPD mengacu pada visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”***.

Makna dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Baru**

Baru memiliki arti sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Maka Kabupaten Padang Pariaman baru dapat dimaknai sebagai keinginan untuk

menjadikan Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk belum pernah ada sebelumnya.

- **Religius**

Religius memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat religi, bersifat keagamaan dan yang bersangkutan-paut dengan religi. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan menjadi kabupaten yang lebih religi.

- **Cerdas**

Cerdas memiliki arti sebagai sesuatu yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketajaman pikiran.

- **Sejahtera**

Sejahtera memiliki arti sebagai sesuatu yang aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Artinya Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat Padang Pariaman yang sentosa, makmur dan selamat.

## **2. Misi**

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah visi. Misi mendeskripsikan tentang mengapa sebuah instansi berada di tengah masyarakat. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) mengemban misi RPJMD yaitu:

1. MISI 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan
  2. MISI 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik
- Melalui visi dan misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP), akan menjadi unit kerja yang mampu melaksanakan peran utama.

## **1. Visi DPMPTP KAB.PADANG PARIAMAN MENETAPKAN VISI 2016-2021,**

**: “Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas dan Akuntabel” .**

Makna dari VISI tersebut adalah:

- 1) Peningkatan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menjadi penyelenggara dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk.
- 2) PTSP yang berkualitas adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang transparan, tepat waktu, sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan investor
- 3) PTSP yang akuntabel adalah penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun pemanfaatan outputnya.

## **2. MISI**

Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) terdiri dari:

1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang Lebih Kondusif
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Mewujudkan industri kecil menengah yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL 4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERINDUSTRIAN (DPMPTP)**

MISI PEMDA	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
MISI 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya Jumlah investori		Meningkatnya Jumlah Investori di Padang Pariaman	Jumlah Investor
MISI 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik				

#### **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020**

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 termasuk untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP). IKU Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN DPMPTP**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Satuan
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
01.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi PMA	10	Miliar
		Realisasi investasi PMDN	15	Miliar
		Jumlah Investor (IKU)	75	Perusahaan
02.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	78,86	Indeks
03	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2,5%	IKM
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,322	IKM
04	Meningkatnya jumlah sentra/ klaster industri produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	1	Sentra

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPMPTP Padang Pariaman tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTP akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja DPMPTP yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

**LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DPMPTP**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	318,07%
2	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	2,5 %
3	Meningkatnya kluster industri produk unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Unggulan Daerah	1 Kluster (100%)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,86

<b>NO.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 78.865.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.635.538.360
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 195.815.850
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 418.155.800
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 106.328.000
7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.810.000
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.19.150.736.000
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.45.000.000
10	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - TA 2020  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

	Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.500.000
12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan	Rp.110.375.000
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan	Rp.354.242.000
14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.040.000
	JUMLAH	Rp. 24.195.016..010

Pariaman, 29 Januari 2021  
Pimpinan SKPD

Rudy Repenaldi Rilis, SSTP,MM  
NIP. 197904021998031003



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**D**inas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2020**

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

**TABEL 5. INTERPRETASI TARGET PENILAIAN**

Skala Ordinal (%)	Prediket/Kategori
>100	Sangat Berhasil
$90 < s/d \leq 100$	Berhasil
$80 < s/d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s/d \leq 80$	Kurang Berhasil
$\leq 70$	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pastikan pada sub bab ini tersaji capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

**Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>							
01.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi investasi PMA	Miliar	10	143.377	1433,78	Sangat Berhasil
		Realisasi investasi PMDN	Miliar	15	1.186,92	791,28	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (IKU)	Perusahaan	75	117	150,00	Sangat Berhasil
02.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,86	88,52	112,24	Sangat Berhasil
03	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	2,5	1,92	76,8	Kurang Berhasil
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	2363	2289	96,86	Berhasil
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Sentra	1	1	100	Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020 dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
01.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi investasi PMA	Miliar	24.116	10	143.377	1433,78	Sangat Berhasil
		Realisasi investasi PMDN	Miliar	294.115	15	1.186,92	791,28	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (IKU)	Perusahaan	84	75	117	150,00	Sangat Berhasil
02.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,70	78,86	88,52	112,24	Sangat Berhasil
03	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	2,2	2,5	1,92	76,8	Kurang Berhasil
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	2289	2363	2289	96,86	Sangat Berhasil
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industri produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Sentra	1	1	1	100	Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020 dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi

**Tabel 7. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
				1	3	5	7	9	1	2	5	7	7	% Realisasi sd th ini (2020) / target Akhir Jangka Menengah (2020)	
INDIKATOR KINERJA UTAMA															
01	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi investasi PMA	Miliar	36,3	8,4	8,8	9,2	10	36,3	8,4	27,4	24,11	143.377	1433,78	Sangat Berhasil
		Realisasi investasi PMDN	Miliar	85,2	174,7	183,4	192,6	15	85,2	174,7	245	294.11	1.186,92	791,28	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (IKU)	Perusahaan	30	35	40	45	75	45	45	52	84	117	150,00	Sangat Berhasil
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	80	83	85	78,86	83,14	72,9	77,24	80,70	88,52	112,24	Sangat Berhasil
03	Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	2,40%	2,42%	2,45%	2,47%	2,5	3%	2,45%	2,71%	2,71%	1,92	76,8	Berhasil
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	1.256	1.300	1.350	1.400	2363	1.700	2.178	2263	2289	2289	96,86	Sangat Berhasil
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020:

**Indeks Kualitas Penanaman Modal**



**Sasaran 1:  
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam rangka menghitung pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	75 perusahaan	117 perusahaan	156,00	Sangat Berhasil
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rp 160 M	Rp 1.330.3	731.25	Sangat Berhasil
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	55 %	318,07%	478.3	Sangat Berhasil

Peraturan presiden nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik, perizinan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan di berikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau pemenuhan komitmen. Berdasarkan Perka BKPM No.6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dengan berlakunya PP nomor

24 tahun 2018, pelaku usaha yang ingin berinvestasi dapat mendaftarkan izin yang mereka inginkan secara online melalui aplikasi OSS *online single submission*.

Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Keg. Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Angaran tahun 2020 : Rp. 41.900.000

Realisasi : Rp. 41.845.600

Strategi yang dilakukan :

- a. Melakukan pembinaan yang dilakukan secara intensif kepada perusahaan - perusahaan tentang tata cara pembuatan LKPM secara Online.
- b. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi

2. Penjajakan Investasi dan Promosi

Angaran tahun 2020 : Rp. 30.250.000

Realisasi : Rp. 30.116.600

Strategi yang dilakukan :

- a. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi,
- b. Pengaturan kegiatan promosi sebaiknya lebih fokus pada sektor yang menjadi prioritas,
- c. Penyusunan materi promosi yang informatif dan menarik,
- d. Adanya koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain yang berhubungan dalam pengembangan program promosi investasi,
- e. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi investasi, dan
- f. Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media online.

### 3. Penyusunan Data Perkembangan Investasi

Angaran tahun 2020 : Rp. 28.300.000

Realisasi : Rp. 28.052.000

Strategi yang dilakukan :

- a. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi potensi daerah.
- b. Melakukan penyusunan peta potensi investasi daerah

Keberhasilan *indikator 1 (satu)* disebabkan pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha terjadi perubahan dari dilayani menjadi melayani dengan adanya pelayanan yang langsung ke masyarakat dengan beragam inovasi yaitu SEJATI (Sehari jadi gratis) AJEP PAPA ( Antar jemput perizinan Padang Pariaman) SINARO (Sistem informasi berbasis android) TERASI (Tracking status izin), TAMU KECE (Konsultasi bisnis pemula dan Weekend Service), BESAN POS (Bekerja sama dengan PT.POS Indonesia), PAPA JOSS (Padang Pariaman Jemput OSS), PANTER DARAT (Pengaduan terintegrasi dengan Inspektorat), KLINIK LKPM ( Konsultasi Layanan Investasi untuk kemudahan laporan kegiatan Penanaman Modal), SIKIM (Suara Industri Kecil Menengah), SIPINTER (Sistem Informasi Peluang Investasi Terintegrasi), PALANTA (Pelayanan Lansung Tuntas), PURI INDAH (Pusat Informasi Investasi dan Perizinan daerah), PENA TARASIK (Pelayanan Perizinan Terintegrasi Kecamatan), Kampung Cokelat Malibou (akan terealisasi pada tahun 2020 namun sudah di loncingkan pada tahun 2019), TTD EL (Tanda Tangan Elektronik), PELARI CETAR (Pelayanan Perizinan Cetak Dirumah), klinik LKPM perubahan sarana pelayan seperti gedung kantor yang representatif, pada akhirnya dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Adanya peraturan bupati yang mendukung percepatan realisasi ivestasi di kabupaten padang pariaman yaitu perbub nomor 17 tahun 2017 tentang pemberian isentif dan kemudahan berusaha akibat dari kebijakan tersebut, terjadi peningkatan realisasi investasi yang mana tahun 2020 target realisasi 160 M tercapai realisasi pada tahun 2020 sebanyak 1,330,3 M.

Untuk indikator 2 (dua), jumlah nilai investasi berskala nasional, mencapai realisasi Rp 1.330.301.000.000,- dengan persentase capaian 318,07 %. Nilai ini dihitung berdasarkan realisasi investasi perusahaan baik PMA maupun PMDN. Dengan rincian PMDN sebesar Rp 1.186.92 M,- dan PMA sebesar Rp 143.377 M,- Keberhasilan ini karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga banyak perusahaan yang menambah dan meningkatkan investasinya, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang pro investasi, seperti pencabutan Izin Gangguan (HO) dan retribusinya, selanjutnya meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan investasi melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, dan terakhir DPMPTP melalui bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan tentang cara pembuatan dan pelaporan LKPM secara online. Dibandingkan dengan tahun 2019 untuk realisasi indikator ini memang mengalami kenaikan.

Untuk Indikator 3 (tiga) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi. Dihitung dengan menggunakan rumus IKU tanggal 10 Desember 2019 :

Sedangkan menurut rumus Pertumbuhan nilai investasi yang seharusnya

$$\frac{(\text{jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n - 1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 1.330.301.000.000 - \text{Rp. } 318.200.000.000}{\text{Rp. } 318.200.000.000} \times 100\%$$

$$= 318,07 \%$$

$$= \text{Jumlah PMDN dan PMA} = 117 \text{ Perusahaan}$$

Terjadi peningkatan jumlah investor dari target 75 dan realisasi menjadi 117 investor ini terjadi karena adanya kemudahan berusaha yang diberikan kepada investor selain itu adanya layanan prioritas dan pedampingan kepada investor dalam pencatatan laporan perkembangan investasi secara online.

Sementara realisasi investasi untuk tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 1.4 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 318,07 %.



Hal ini terjadi karena gencarnya melakukan pendampingan ke perusahaan dalam penginputan lkpm dan juga kepatuhan PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) selaku investor jalan tol padang – pekanbaru dalam melaporkan perkembangan investasinya

Sama halnya dengan indikator 2 (dua) Keberhasilan ini karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga banyak perusahaan yang menambah dan meningkatkan investasinya, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang pro investasi, seperti pencabutan Izin Gangguan (HO) dan retribusinya, selanjutnya meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan investasi melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, dan terakhir DPMPTP melalui bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan tentang cara pembuatan dan pelaporan LKPM secara online.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi





## **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka menghitung peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. DPMPTP sebagai pelaksana PTSP di Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa:

### **1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
<b>Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat</b>	78,86%	88,52%	112,24	Sangat Berhasil

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dihitung melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemda Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Setdakab Padang Pariaman bekerjasama dengan Tim PSKP Unand. Survey dilakukan terhadap masyarakat dan investor yang sedang dan pernah mengurus perizinan melalui DPMPTP Padang Pariaman. Dibandingkan dengan tahun 2019 nilai IKM untuk DPMPTP mengalami kenaikan, yaitu dengan nilai 88,52% kategori nilai A-. Tahun 2020 DPMPTP telah berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti pelayanan perizinan secara elektronik melalui aplikasi OSS (online single submission), merevisi berbagai peraturan dan kebijakan, merevisi SOP dan Standar Pelayanan, rehabilitasi ruangan pelayanan, transparansi biaya, disiplin pegawai, keramahan petugas dan berbagai indikator pelayanan publik yang berkualitas lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – TA 2020  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman



Keberadaan tim teknis yang masih belum berada di PTSP menjadi kendala dalam proses perizinan yang membutuhkan rekomendasi dan survey ke lapangan sehingga terkadang menimbulkan keterlambatan dalam proses perizinan. Kedepan DPMPTP melalui Bidang Perizinan dan Non perizinan telah berkomitmen akan mempercepat proses perizinan masyarakat, karena hal ini juga telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sehingga akan meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Salah satunya dengan menerapkan penggunaan tanda tangan secara elektronik pada dokumen perizinan apabila pimpinan OPD sedang tidak berada di tempat atau jika pimpinan melakukan perjalanan dinas luar daerah. Program yang mendukung sasaran dan indikator ini adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.

Penghargaan DPMPTP :

1. Penghargaan dari OMBUDSMAN RI kepada Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu kabupaten Predikat Kepatuhan terbaik dan DPMPTP menjadi salah satu OPD yang dinilai.
2. Penghargaan dari Bupati Padang Pariaman yang diberikan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Terinovative Tahun 2020
3. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020.

## LAMPIRAN

### Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

#### Penghargaan DPMPTP Tahun 2020



- **Penghargaan Kepada DPMPTP Padang Pariaman Sebagai Peringkat I Dengan Nilai 4,81 Dalam Penilaian Maturitas Level Antar OPD dan Unit Kerja Dilingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2020**



- **Penghargaan Kepada DPMPTP Padang Pariaman Sebagai Peringkat II Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2020**

### Penghargaan DPMPTP Tahun 2019



## Penghargaan DPMPTP Tahun 2018





### Sasaran 3: Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah

Untuk menghitung tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah di Kabupaten Padang Pariaman. DPMPTP telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

#### 1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pada tahun 2020 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Meningkatnya pertumbuhan IKM ini dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2,5%	1,92%	89,06%	Kurang Berhasil
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2363 buah	2289 buah	96,86%	Berhasil

Untuk Indikator Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - \text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - 1} \times 100\%$$

$$= \frac{2332 - 2288}{2288} \times 100\% = 1,92 \%$$

Kemudian untuk indikator kedua, Jumlah Industri Kecil dan menengah. Pada tahun 2020 jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Padang



Pariaman adalah 2289 buah IKM. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 2263 buah IKM.

### **3. Analisis Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi**

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan IKM di Kabupaten Padang Pariaman menjadi kurang berkembang. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli dari masyarakat sehingga produk yang dihasilkan oleh IKM Kabupaten Padang Pariaman kurang diminati. Selain itu melemahnya kemampuan ekonomi di masyarakat menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan IKM di Kabupaten Padang Pariaman menjadi terhambat.

Terjadinya reconfusing anggaran pada tahun 2020 menyebabkan kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produk Industri Kerajinan Daerah dan kegiatan Fasilitasi Izin, Sertifikasi Halal, SNI dan Merek Dagang pada program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pelatihan yang telah disusun dan direncanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari IKM di Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat dilaksanakan. Reconfusing anggaran yang terjadi pada tahun 2020 juga menyebabkan kegiatan fasilitasi halal yang akan diberikan untuk IKM di Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat dilaksanakan.

### **4. Strategi Upaya Kedepan**

Strategi yang akan dilakukan kedepan adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap IKM di Kabupaten Padang Pariaman yang antara lain:

1. Memberikan pelatihan untuk IKM di Kabupaten Padang Pariaman
2. Memberikan fasilitasi sertifikat halal, MD dan SNI
3. Memberikan fasilitasi peralatan untuk IKM di Kabupaten Padang Pariaman

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Keberhasilan kedua indikator diatas karena Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaaman berhasil

menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan industri kecil dan menengah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini juga disebabkan karena DPMPTP melalui Bidang Bina Industri terus menerus secara intensif melakukan pembinaan terhadap IKM, kemudian DPMPTP juga memfasilitasi pemberian kemudahan izin usaha IKM berupa fasilitasi perizinan PIRT, sertifikat halal, SNI, MD untuk IKM pangan, fasilitasi kerjasama IKM dengan mitra atau pengusaha besar. Dengan terjalinnya kemitraan ini diharapkan akan membuka akses IKM terhadap teknologi, modal dan pemasaran.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.





#### **Sasaran 4: Meningkatnya jumlah sentra/klaster industri produk unggulan daerah**

DPMPTP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah sentra/klaster industri produk unggulan daerah. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

##### **1. Jumlah Industri Unggulan Daerah**

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
<b>Jumlah Industri Unggulan Daerah</b>	1 buah	1 buah	100	Sangat Berhasil

Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Pemerintah Daerah Kab.Padang Pariaman melalui DPMPTP berhasil menjadikan Sentra Coklat di Malibou Anai sebagai industri unggulan daerah. Kawasan/sentra ini berkonsep eduwisata yakni sentra IKM cokelat yang menggabungkan layanan wisata dengan nilai pendidikan tentang pengolahan biji cokelat dari hulu ke hilir. Program yang mendukung sasaran dan indikator ini adalah Program Penataan Struktur Industri.



## B. Realisasi Anggaran

---

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada DPMPTP Padang Pariaman, sumber pendanaan pada DPMPTP hanya bersumber dari APBD Padang Pariaman, dan tidak ada sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, pinjaman maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan yang mendukung sasaran dan indikator kinerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut

**Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
A	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman				
1.	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>23.000.000,-</b>	<b>22.797.300,-</b>	<b>202.700,-</b>	<b>99,12</b>
	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	23.000.000,-	22.797.300,-	202.700,-	99,12
2.	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>100.450.000,-</b>	<b>100.014.200,-</b>	<b>435.800,-</b>	<b>99,57</b>
	Penjajakan Investasi dan Promosi	30.250.000,-	30.116.600,-	133.400,-	99,56
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	41.900.000,-	41.845.600,-	54.400,-	99,87
	Penyusunan data Perkembangan investasi	28.300.000,-	28.052.000,-	248.000,-	99,12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - TA 2020  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

B Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	<b>138.995.000,-</b>	<b>138.178.000,-</b>	<b>817.000,-</b>	<b>99,41</b>
	Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.220.000,-	38.879,600,-	340.400,-	99,13
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	35.000.000,-	34,990,000,-	10,000,-	99,97
	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan	14.080.000,-	13.983.400,-	96.600,-	99,31
	Desiminasi Informasi Pelayanan Perizinan	39.000.000,-	38.680.600,-	319.400,-	99,18
	Pelayanan langsung masyarakat	11.695.000,-	11.644.400,-	50.600,-	99,57
2	<b>Perogram pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan</b>	<b>69.460.000,-</b>	<b>68.186.750,-</b>	<b>1.273.250,-</b>	<b>98,17</b>
	Pengendalian, pengawasan, penertiban perizinan dan non perizinan	47.720.000,-	47.249.750,-	470.250,-	99,01
	Operasional peningkatan PAD	11.440.000,-	10.768.000,-	672.000,-	94,13
	Peningkatan kerjasama perizinan	10.300.000,-	10.169.000,-	131.000,-	98,73

C Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah					
1.	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>116.549.856,-</b>	<b>96.458.130,-</b>	<b>20.091.726,-</b>	<b>82,76</b>
	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produk Industri Kerajinan Daerah	31.524.856,-	13.173.530,-	18.351.326,-	41,79
	Fasilitasi Izin, Sertifikasi Halal, Standar Nasional Indonesia dan MD	6.475.000,-	5.685.000,-	790.000,-	87,80
	Penyusunan Ranperda Rencana pembangunan Industri Kabupaten (RPIK Padang Pariaman)	78.550.000,-	77.599.600,-	950.400,-	98,79

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – TA 2020  
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

D	<b>Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah</b>				
1.	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>8.704.540.000,-</b>	<b>8.199.363.885,-</b>	<b>505.176.115,-</b>	<b>94,20</b>
	Pembangunan Sentra IKM Cokelat (DAK)	5.854.755.000,-	5.351.202.945,-	503.552.055,-	91,40
	Pengadaan Mesin dan Peralatan sentra IKM coklat (DAK)	2.821.340.000,-	2.819.716.000,-	1.624.000,-	99,94
	Operasional Penunjang DAK Sentra IKM	28.445.000,-	28.444.940,-	60,-	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.324.531.260,-</b>	<b>9.767.036.399,-</b>	<b>557.494.861,-</b>	<b>94,60%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Akuntabilitas Kinerja DPMPTP Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh DPMPTP Tahun 2019 adalah :

- 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Pencapaian target PAD lebih dari 100%
- 3) Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan ke DPMPTP sebagai pelaksana PTSP
- 4) Melakukan berbagai inovasi seperti menggunakan aplikasi
  - a) SEJATI (Sehari jadi gratis)
  - b) AJEP PAPA ( Antar jemput perizinan Padang Pariaman)
  - c) SINARO (Sistem informasi berbasis android)
  - d) TERASI (Tracking status izin)
  - e) TAMU KECE (Konsultasi bisnis pemula dan Weekend Service)
  - f) BESAN POS (Bekerja sama dengan PT.POS Indonesia)
  - g) PAPA JOSS (Padang Pariaman Jemput OSS)
  - h) PANTER DARAT (Pengaduan terintegrasi dengan Inspektorat)
  - i) KLINIK LKPM ( Konsultasi Layanan Investasi untuk kemudahan laporan kegiatan Penanaman Modal)
  - j) SIKIM (Suara Industri Kecil Menengah)
  - k) SIPINTER (Sistem Informasi Peluang Investasi Terintegrasi)
  - l) PALANTA (Pelayanan Lansung Tuntas)
  - m)PURI INDAH (Pusat Informasi Investasi dan Perizinan daerah)
  - n) PENA TARASIK (Pelayanan Perizinan Terintegrasi Kecamatan)



- o) Kampung Cokelat Malibou (akan terealisasi pada tahun 2020 namun sudah di loncingkan pada tahun 2019 ini)
  - p) TTD EL (Tanda Tangan Elektronik)
  - q) PELARI CETAR (Pelayanan Perizinan Cetak Dirumah)
  - r) SIPADU dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan aplikasi LKPM Online untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA/PMDN,
- 5) Meningkatnya Realisasi Investasi
- 6) Menjadikan sentra coklat di Kawasan Malibou Anai menjadi Industri Unggulan Daerah berupa fasilitasi perizinan PIRT, sertifikat halal, SNI, MD untuk IKM pangan, fasilitasi kerjasa IKM dengan mitra atau pengusaha besar.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

## **B. Hambatan dan Masalah yang dihadapi**

1. Belum selesainya perda RTRW
2. Belum semua kecamatan memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), sesuai yang diakomodir oleh perda RTRW
3. Promosi potensi peluang investasi, Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas 1300 M<sup>2</sup>, mempunyai potensi 3 unggulan yang bisa dijual serta menarik minat investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Potensi peluang Investasi unggulan di maksud yaitu dari Sektor Pariwisata, sektor pertanian/ Perkebunan, dan Sektor Startegis. Dengan adanya faktor ini maka pertumbuhan

ekonomi masyarakat akan meningkat, sehingga target untuk memajukan daerah dapat tercapai

4. Terjalinnnya kemitraan terhadap industri diharapkan akan membuka akses IKM terhadap teknologi, modal dan pemasaran

### **C. Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja DPMPTP pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 3) Berkembangnya industry kecil menengah
- 4) Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi DPMPTP Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program DPMPTP Tahun 2020.

Semoga Allah SWT memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Januari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan  
Terpadu Perindustrian Padang Pariaman



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M**  
Pembina Tk. I NIP. 19790402 199803 1 003